

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penetapan penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi; 2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penetapan penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan penetapan penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi bahwa problematika hukum yang timbul berupa kekurangjelasan aturan (kekaburan norma) dalam KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu, Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri; 2) penetapan penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang bahwa revisi dalam aturan KUHAP bahwa besaran nominal jaminan uang tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan besar jumlah kerugian negara atas terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga apabila terdakwa melarikan diri dalam masa penangguhan penahanannya kerugian negara telah dikembalikan karena besar uang jaminan sama dengan jumlah kerugian negara atas perbuatan terdakwa tersebut.

Kata Kunci: Penetapan Penangguhan Penahanan, Tindak Pidana Korupsi

REGARDING DETERMINATION OF SUSPENSION OF DETENTION IN CORRUPTION CRIME CASES

ABSTRACT

This study aims 1) to find out and analyze the regulation of regarding the determination of suspension of detention in cases of corruption; 2) to know and analyze. regarding the determination of suspension of detention in future corruption cases. The research method used is normative legal research method and the approach used is statutory approach and conceptual approach and case approach. Analysis of the legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations as well as assessing relevant legal materials. The results of the study show that 1) regulation of regarding the determination of suspension of detention in cases of corruption that the legal problems that arise in the form of unclear rules (blurred norms) in the Criminal Procedure Code do not explain the large amount of the bail if the suspension is carried out with a guarantee of money and if the suspension is carried out with a guarantee from the Criminal Procedure Code also does not provide an explanation. In addition, Article 31 of the Criminal Procedure Code also does not explain the legal consequences of the guarantor if the suspect or defendant he guarantees runs away; 2) The regarding the determination of suspension of detention in future corruption cases is that the revision in the KUHP rules that the nominal amount of the guaranteed money is carried out by taking into account the large amount of state losses due to the occurrence of the corruption crime. So that if the defendant escapes during the period of suspension of detention the state losses have been returned because the amount of the bail is the same as the amount of state losses for the defendant's actions.

Keywords: Determination of Suspended Detention, Corruption Crime